

## ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI RIAU

Suci Nurulita<sup>1</sup>), Hamdani Arifulsyah<sup>2</sup>), Yefni<sup>3</sup>)

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Politeknik Caltex Riau

email: <sup>1</sup>[suci@pcr.ac.id](mailto:suci@pcr.ac.id), <sup>2</sup>[dani@pcr.ac.id](mailto:dani@pcr.ac.id), <sup>3</sup>[yefni@pcr.ac.id](mailto:yefni@pcr.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to examine the effect of regional financial performance on economic growth and its impact on unemployment rate in Riau Province. Measurement of regional financial performance are independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio. The economic growth is measured by using the growth rate of GRDP. For unemployment is measured by the percentage of unemployment rates. The sample is 12 Local Government in Riau Province for five years research that's from year 2011 until 2015. Data analysis used in this research is path analysis method. The results of this study indicate that there is no significant influence between the independence ratio and effectiveness ratio of the region to the economic growth of Riau Province. As for the efficiency ratio, there is a significant influence between efficiency ratio to economic growth in Riau Province. In addition, the results of this study also show that there is no significant influence between independence ratio and efficiency ratio of the region to the unemployment rate in Riau Province through the economic growth variable of Riau Province. As for the effectiveness ratio, there is a significant influence between effectiveness ratio to the unemployment rate through economic growth in Riau Province.*

**Keywords:** *economic growth; regional financial performance; unemployment rate*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau. Pengukuran kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. Pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha dengan migas. Untuk pengangguran diukur dengan persentase tingkat pengangguran yang ada di masing-masing daerah tersebut berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka. Sampel penelitian ini adalah 12 Pemerintah Daerah di Provinsi Riau selama 5 tahun penelitian yaitu dari tahun 2011 hingga 2015. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efektifitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sedangkan untuk rasio efisiensi, terdapat pengaruh yang signifikan antar rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau melalui variabel pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sedangkan untuk rasio efektifitas, terdapat pengaruh yang signifikan antar rasio efektifitas terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

**Kata kunci:** *kinerja keuangan daerah; pertumbuhan ekonomi; tingkat penganggura*

---

*Detail Artikel :*

*Diterima : 11 April 2018*

*Disetujui : 20 Mei 2018*

*DOI : [10.22216/jbe.v3i3.3350](https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3350)*

---

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kemampuan suatu negara dalam penyediaan kebutuhan berupa barang dan jasa kepada masyarakat sehingga memungkinkan untuk menaikan standar hidup negara tersebut yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang (Hamzah, 2013). Dalam kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada, peningkatan daya beli konsumen dan perkembangan lainnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya (Astuti, 2015).

Pertumbuhan ekonomi Riau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang melambat. Meskipun mampu mencatat angka pertumbuhan migas yang cukup tinggi, namun secara umum belum mampu melebihi pertumbuhan sebelum periode krisis. Dalam publikasi *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Riau tahun 2015* oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau terus mengalami perlambatan selama periode 2011 – 2014. Selama kurun waktu 4 tahun tersebut kinerja perekonomian Provinsi Riau memiliki laju pertumbuhan rata-rata 3,61%. Melambatnya kinerja ekonomi Riau dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan negatif. Kegiatan ekonomi utama masih bersifat ekstraktif, yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara langsung (BAPPENAS, 2015).

Selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Riau cenderung meningkat dan lebih tinggi dari pendapatan per kapita nasional. Dukungan pendapatan dari sektor pertambangan mempengaruhi peningkatan pendapatan perkapita di Provinsi Riau. Jika pada tahun 2010 rasio PDRB perkapita Provinsi Riau dan PDB Nasional sebesar 242,2 persen, maka pada tahun 2014 rasionya meningkat menjadi 258,84 persen. Besarnya PDRB perkapita yang menunjukkan tingkat kesejahteraan di Provinsi Riau relatif meningkat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Demikian juga halnya tahun 2015 pada *Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau No. 10/02/14/Th. XVII, 5 Februari 2016* menunjukkan bahwa ekonomi Riau tumbuh 0,22% melambat dibanding tahun 2014 sebesar 2,7% (BPS, 2016).

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan bagaimana kinerja pemerintah dalam pengelolaan daerahnya masing-masing. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menangani permasalahan pengangguran. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran. Dalam penelitian ini juga akan melihat apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap pengangguran di Riau. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat pengangguran terbuka di provinsi Riau dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2010 s.d 2015) mengalami penurunan walaupun tidak begitu signifikan dimana puncak angka pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan tingkat pengangguran sebesar 10,27%. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran di Riau sudah menurun menjadi 7,83% walaupun angka ini naik dibandingkan tahun 2014 lalu dimana tingkat pengangguran sebesar 6,56% (BPS, 2015).

Setiap Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penerapan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip akuntansi. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. Dengan kata lain APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPRD yang mengandung estimasi pendapatan yang akan diterima serta belanja yang disediakan untuk membiayai program kerja dan kegiatan pembangunan dalam batas-batas anggaran yang telah ditetapkan pada periode anggaran.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan yang berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. Kemandirian daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya. Efektivitas kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2012). Efisiensi kinerja keuangan daerah menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2012). Dengan adanya rasio-rasio tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran.

Penelitian ini sudah banyak dilakukan, salah satunya (Ani & Dwirandra, 2014) yang menggambarkan bahwa kinerja keuangan daerah di Provinsi Bali mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terlihat pada rasio kemandirian daerah namun, pertumbuhan pendapatan tidak mampu mendorong pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk mengembangkan infrastruktur usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga belum mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Provinsi Riau kaya akan sumber daya alam yang tersebar diberbagai wilayah yang dapat dikelola dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Jika Pemerintah daerah setempat mengelola dengan baik, hal tersebut tentunya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah masing-masing sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang layak serta mengurangi tingkat pengangguran.

### ***Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran***

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product*

(GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Singkatnya, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk karena tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi.

Pengangguran menurut definisi BPS adalah (1) mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan; (2) mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha; (3) mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan hal tersebut, tampak jelas bahwa mereka yang dianggap pengangguran hanyalah kelompok penduduk yang termasuk angkatan kerja, yakni kelompok penduduk usia kerja (Usia 15 tahun s.d. 64 tahun) yang tidak bekerja dengan berbagai kondisi (4 kondisi) yang disebutkan di atas. Angkatan kerja juga tidak mencakup mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya.

### ***Kinerja Keuangan Daerah***

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat diukur secara kualitas maupun kuantitas yang sudah dicapai oleh seorang maupun instansi/lembaga/perusahaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 pengertian kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. (Keban, 2008) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah merupakan suatu standar untuk menilai kemampuan lembaga pemerintah dalam mendanai input dan dari sampai seberapa jauh lembaga pemerintahan mengikuti proses serta target yang telah ditentukan.

Dalam organisasi pemerintahan untuk mengukur kinerja keuangan terdapat beberapa ukuran kinerja yang dapat diperhitungkan diantaranya, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Rasio Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai atau membiayai sendiri kegiatan pemerintah, bila PAD yang diperoleh oleh daerah tinggi maka persentase PAD dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi, begitu pula sebaliknya (Florida, 2006). Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2012), suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan atau peningkatan pembangunan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2012). Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan untuk hipotesisnya adalah:

- H1 : Kinerja Keuangan Daerah yaitu Rasio Kemandirian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
- H2 : Kinerja Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
- H3 : Rasio Efisiensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menangani permasalahan

pengangguran. Dengan baiknya kinerja keuangan daerah yang tepat sasaran tentunya akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran. Maka dari itu dapat dirumuskan untuk hipotesis yang keempat adalah:

H4 : Kinerja Keuangan Daerah yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi serta Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengangguran

Dengan kemandirian, efektivitas dan efisiennya kinerja pemerintah daerah tentunya dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di daerah setempat seiring dengan pertumbuhan perekonomian daerah tersebut secara tidak langsung. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk menaikkan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang (Hamzah, 2013). Maka dari itu dapat dirumuskan untuk hipotesisnya adalah:

H5 : Kinerja Keuangan Daerah yaitu Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi

H6 : Kinerja Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi

H7 : Kinerja Keuangan Daerah yaitu Rasio Efisiensi berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksplanasi. Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di daerah Provinsi Riau. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel eksogen (variabel independen/bebas), variabel intervening dan variabel endogen (variabel dependen/terikat). Variabel kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi adalah variabel eksogen. Variabel pertumbuhan ekonomi adalah variabel intervening, sedangkan variabel tingkat pengangguran adalah variabel endogen. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 Pemerintah Daerah di Provinsi Riau dengan periode pengamatan tahun penelitian dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan melalui beberapa pengujian yaitu uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis deskriptif dan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mencari pengaruh antar setiap variabel. Defenisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Defenisi Operasional Variabel**

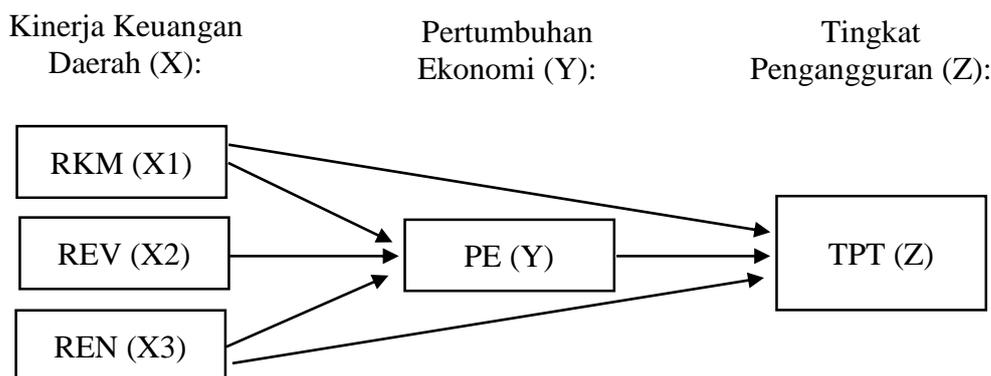
VARIABEL	KONSEP	INDIKATOR	SKALA
<b>Kinerja Keuangan (X):</b>			
<b>Rasio Kemandirian(X<sub>1</sub>)</b>	Rasio Kemandirian digunakan untuk mengukur kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya	(Realisasi PAD)/ (Total Pendapatan Transfer + (Utang -Utang PFK - Utang Pajak)) x 100%	Rasio
<b>Rasio Efektivitas (X<sub>2</sub>)</b>	Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang di targetkan.	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	Rasio
<b>Rasio Efisiensi (X<sub>3</sub>)</b>	Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal namun memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan.	$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$	Rasio
<b>Variabel Intervening : Pertumbuhan Ekonomi (Y)</b>	Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar	$PE = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}}$	Rasio

harga konstan dengan tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha migas kabupaten/kota di provinsi Riau.

<b>Tingkat Pengangguran (Z)</b>	Kelompok penduduk yang termasuk angkatan kerja, yakni kelompok penduduk usia kerja (Usia 15 tahun s.d. 64 tahun) yang tidak bekerja.	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Rasio
---------------------------------	--	--	-------

Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*) dengan menggunakan aplikasi *software* SPSS versi 22. Dalam *path analysis* terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung artinya arah hubungan antar dua variabel langsung tanpa variabel lain, sementara pengaruh tidak langsung harus melewati variabel lain. Untuk melihat besarnya pengaruh langsung antar variabel dengan menggunakan koefisien beta atau koefisien regresi yang distandarisasi, adapun besarnya pengaruh tidak langsung dalam *path analysis* adalah dengan cara mengalikan koefisien *path* pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel yang dimaksud yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran sebagai variabel endogen dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung variabel tersebut dengan rasio-rasio kinerja keuangan daerah, antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi sebagai variabel eksogen.

**Gambar 1**  
**Desain Penelitian**



Adapun persamaan regresi untuk menguji hipotesisnya adalah:

$$PE = \alpha + \beta_1 RKM + \beta_2 REV + \beta_3 REN + e$$

$$TPT = \alpha + \beta_1 RKM + \beta_2 REV + \beta_3 REN + \beta_4 PE + e$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian Analisis Deskriptif

Data dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Berikut ini pada Tabel 2 disajikan statistik deskriptif data penelitian pada Pemerintah Daerah di Provinsi Riau yang terdiri dari 60 observasi tahun 2011 hingga 2015 yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	<b>N</b>	<b>Minim um</b>	<b>Maximu m</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Rasio Kemandirian (RKM)	6 0	2.47	90.39	13.496 2	16.10328
Rasio Efektivitas (REV)	6 0	47.45	195.80	110.22 25	29.62877
Rasio Efisiensi (REN)	6 0	68.89	169.33	100.05 85	18.08804
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	6 0	-3.85	8.39	3.5215	3.19785
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6 0	1.90	16.98	7.2242	2.95349
Valid N (listwise)	6 0				

Sumber: Data olahan SPSS, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut untuk variabel independen pertama diperoleh nilai rata-rata dari kinerja keuangan daerah di Provinsi Riau yang diukur dengan Rasio Kemandirian selama tahun 2011 hingga 2015 yaitu 13,5% dengan kisaran minimum sebesar 2,47% dan maksimum 90,39% serta standar deviasi atau ukuran penyebaran datanya sebesar 16,10%. Hal ini berarti semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin baik karena menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Kemandirian keuangan pemerintah daerah di provinsi Riau pada umumnya masih menunjukkan nilai Kurang Baik hal ini tampak pada kondisi 5 tahun pengamatan penelitian dengan angka rata-rata 13,5%. Berdasarkan perhitungan, rasio kemandirian keuangan daerah yang tertinggi adalah Pemda Provinsi ditahun 2015 dengan nilai 90,39% yang berarti Sangat Baik. Kesenjangan yang cukup besar ini disebabkan karena sumber PAD untuk masing-masing daerah berbeda.

Variabel independen kedua adalah Rasio Efektivitas, berdasarkan hasil uji statistik tersebut dapat diperoleh nilai rata-ratanya selama tahun 2011-2015 sebesar 110,2%, nilai minimum sebesar 47,45% dan maksimum 195,8% dengan standar deviasinya sebesar 29,6%. Semakin besar nilai rasio efektivitas ini maka semakin efektif karena menunjukkan semakin besarnya realisasi penerimaan PAD dibanding dengan target penerimaan PAD yang sudah dianggarkan. Kinerja keuangan daerah di Provinsi Riau pada umumnya sudah berjalan Sangat Efektif hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai rata-rata sebesar 110%. Pemerintah daerah yang masih tidak efektif dalam menjalankan kinerja keuangannya selama lima tahun periode pengamatan adalah Pemda Kabupaten Rokan Hilir, serta Pemda Kota Pekanbaru yakni di tahun 2015 dengan nilai 47,45%. Kesenjangan ini disebabkan karena

adanya perbedaan antara PAD yang ditargetkan dengan realisasi penerimaan PAD di setiap daerah.

Variabel independen ketiga adalah Rasio Efisiensi, berdasarkan hasil uji statistik tersebut dapat diperoleh nilai rata-ratanya selama tahun 2011-2015 sebesar 100,05%, nilai minimum sebesar 68,89% dan maksimum 169,33% dengan standar deviasinya sebesar 18,08%. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja Pemda setempat dalam mengelola keuangan daerahnya. Pada umumnya pemda di Provinsi Riau masih tergolong Kurang Efisien dalam mengelola keuangannya hal ini terbukti dengan nilai rasio efisiensi yang cukup tinggi yaitu sebesar 100,05%. Pemerintah Daerah yang paling Efisien dalam menjalankan pengelolaan keuangannya adalah Pemda Provinsi yakni di tahun 2014 dengan nilai 68,89% serta lima Pemda kabupaten lainnya. Kurangnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah pada umumnya disebabkan pengeluaran yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar, adanya pemborosan keuangan negara atau tingginya pada saat penyusunan anggaran.

Variabel dependen yang pertama dan juga merupakan variabel intervening adalah Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut dapat diperoleh nilai rata-ratanya selama tahun 2011-2015 sebesar 3,52%, nilai minimum sebesar -3,85% dan maksimum 8,39% dengan standar deviasinya sebesar 3,19%. Semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Secara umum pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau sangat rendah yakni hanya bergerak di kisaran angka rata-rata 3,52% dalam lima tahun periode pengamatan. Di Provinsi Riau, kota Pekanbaru dan kabupaten Indragiri Hilir memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan cenderung stabil setiap tahunnya, demikian halnya juga dengan kabupaten Indragiri Hulu dengan laju pertumbuhan ekonominya mencapai 8,39% di tahun 2012 namun mengalami tren penurunan hingga ditahun 2015. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau dikarenakan masih rendahnya kemampuan daerah dalam memperoleh PDRB.

Variabel dependen kedua adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, berdasarkan hasil uji statistik tersebut dapat diperoleh nilai rata-ratanya selama tahun 2011-2015 sebesar 7,22%, nilai minimum sebesar 1,9% dan maksimum 16,98% dengan standar deviasinya sebesar 2,95%. Semakin tinggi rasionya maka berarti semakin tinggi pula angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja di daerah tersebut. Secara umum tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau selama enam tahun periode pengamatan cukup tinggi yakni mencapai 7,22% yang artinya adalah dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 7 orang merupakan pengangguran. Daerah yang tingkat penganggurannya paling rendah adalah di Kabupaten Kuantan Singingi dan yang tertinggi TPT-nya adalah di Kabupaten Kampar. Tingginya tingkat pengangguran dikarenakan ketersediaan lapangan pekerjaan masing-masing daerah berbeda dan belum merata.

### **Hasil Uji Normalitas Data**

Normalitas merupakan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali (Sunyoto, 2010). Dalam penelitian ini, uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, seperti pada Tabel 3 dibawah ini untuk persamaan regresi yang pertama:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas Data Model 1**

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statisti	Df	Sig.	Statisti	df	Sig.
PE	.112	60	.058	.943	60	.007

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Olahan SPSS, 2017

Untuk model regresi kedua hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas Data Model 2**

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statisti	df	Sig.	Statisti	df	Sig.
TPT	.067	60	.200*	.971	60	.162

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Olahan SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 3 dan 4, terlihat bahwa hasil pengujian normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* untuk masing-masing model regresi sudah memiliki signifikansi di atas 0,05. Nilaisignifikan untuk model regresi pertama dan kedua masing-masing sebesar 0,058 dan 0,2.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang sempurna antara variabel independen dalam suatu model regresi berganda. Model yang baik adalah jika tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mengidentifikasi masalah multikolinieritas digunakan nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance-Inflating Factor* (VIF). Tabel 5 menunjukkan hasil uji multikolinearitas model regresi pertama dengan variabel independennya adalah Pertumbuhan Ekonomi.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas Model 1**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.935	3.116			
RKM	-.022	.023	-.113	.999	1.001
REV	.014	.013	.131	.855	1.169

REN	-.077	.022	-.434	.856	1.168
-----	-------	------	-------	------	-------

a. Dependent Variable: PE

Sumber: *Data Olahan SPSS, 2017*

Persamaan model 2 yang mana variabel independennya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tabel 6 berikut ini.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolinieritas Model 2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)					
PKM	.025	.024	.135	.982	1.018
REV	-.019	.014	-.187	.839	1.192
REN	.013	.025	.079	.703	1.423
PE	.068	.140	.074	.738	1.356

a. Dependent Variable

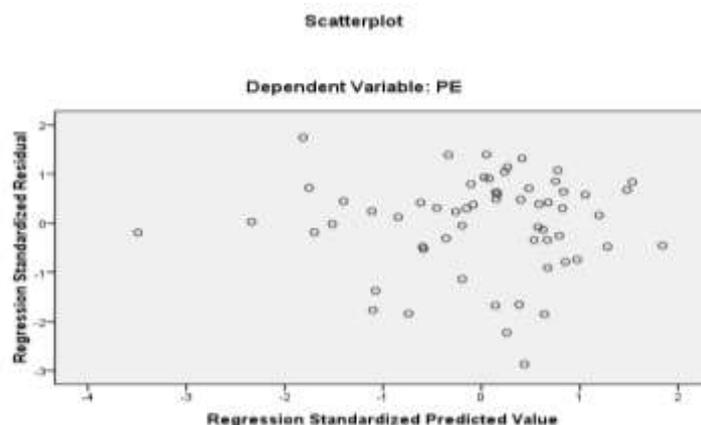
Sumber: Data Olahan SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 5 dan 6, masing-masing variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplott* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang (Sunnyoto, 2010).

**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Pertama**

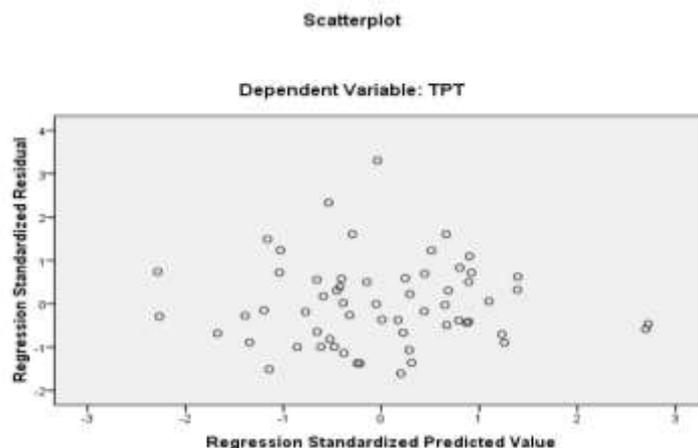


Sumber: Data olahan SPSS, 2017

Untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 2 untuk model regresi pertama dan Gambar 3 untuk model regresi kedua. Berdasarkan grafik *scatterplots* pada Gambar 2, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak sertatersebar

baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari grafik tersebut dapatdisimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi pertama.

**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Kedua**



Sumber: Data olahan SPSS, 2017

Sama halnya dengan sebelumnya, berdasarkan grafik *scatterplots* pada Gambar 3, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi kedua.

**Uji Autokorelasi**

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah melakukan uji Darbin-Watson (DW) dengan ketentuanjika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau  $-2 \leq DW \leq +2$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi Pertama**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>						
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted Square</b>	<b>R</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>	<b>Durbin-Watson</b>
1	.512 <sup>a</sup>	.262	.223	2.81901	1.241	

a. Predictors: (Constant), REN, RKM, REV

b. Dependent Variable: PE

Sumber: Data Olahan SPSS,2017

Dengan menggunakan sampel sebanyak 60 (n=60) yang berasal dari 12 kabupaten/kota dengan periode pengamatan 5 tahun dan jumlah variabel independen tiga variabel (k=3), maka berdasarkan Tabel 7 nilai *Durbin Watson* (DW) yang diperoleh adalah 1,241. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi pertama.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi Kedua**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>						
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted Square</b>	<b>R Std. Estimate</b>	<b>Error of the</b>	<b>Durbin-Watson</b>
1	.248 <sup>a</sup>	.061	-.007	2.96360		1.173

a. Predictors: (Constant), PE, RKM, REV, REN

b. Dependent Variable: TPT

Sumber: *Data Olahan SPSS,2017*

Demikian halnya untuk model regresi kedua dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai *Durbin Watson* (DW) yang diperoleh diantara -2 dan +2 atau  $-2 \leq DW \leq +2$  yakni dengan angka 1,173.

**Analisis Hasil Pengujian Hipotesis dan Interpretasi**

**Analisis Pengujian Hipotesis dan Interpretasi Model Pertama**

Berikut disajikan hasil perhitungan analisis regresi model pertama dan kedua pada Tabel 9 dan 10:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Regresi Model Pertama**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

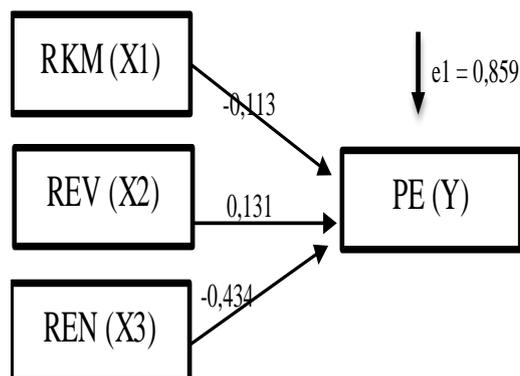
<b>Model</b>		<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
		<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
1	(Constant)	9.935	3.116		3.188	.002
	RKM	-.022	.023	-.113	-.985	.329
	REV	.014	.013	.131	1.055	.296
	REN	-.077	.022	-.434	-	.001
					3.495	

a. Dependent Variable: PE

Sumber: *Data Olahan SPSS,2017*

Analisis uji t-statistik dalam regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (Koefisien regresi) yang diduga untuk menguji model regresi linear berganda sudah mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya atau belum. Hasil uji T statistik yaitu apabila nilai probabilitas t hitung (output SPSS yang ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (5% dengan taraf keyakinan 95%), maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari t hitung tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya (Hipotesis diterima), sedangkan apabila nilai probabilitas t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya (Hipotesis ditolak).

**Gambar 4**  
**Diagram Jalur Struktur Pertama**



Berdasarkan analisis regresi tersebut maka gambaran diagram jalur model untuk struktur pertama dengan nilai  $e1 = 0,859$  yang diperoleh dari nilai akar R Square ( $e1 = \sqrt{1 - 0,262}$ ). Interpretasi model regresi pertama adalah sebagai berikut:

**Pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur dengan Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau**

Berdasarkan hasil analisis data pada koefisien jalur model pertama diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,329 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah yang di provinsi Riau dalam lima tahun pengamatan dari tahun 2011-2015. Maka dapat disimpulkan H1 tidak terdukung. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah juga memiliki arah hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Dengan kata lain, ketika rasio kemandirian tinggi, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2016) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai atau membiayai sendiri kegiatan pemerintah, bila PAD yang diperoleh oleh daerah tinggi maka persentase PAD dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi, begitu pula sebaliknya (Florida, 2006). (Halim, 2012) juga menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Pada dasarnya, penerimaan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, porsi laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penerimaan lainnya. Namun, rasio kemandirian yang tinggi tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bank Dunia 1997 yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal (kemandirian) dapat meningkatkan instabilitas makro ekonomi sehingga akan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ketika desentralisasi fiskal tinggi, maka pemerintah daerah kurang efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Selain itu, pemerintah daerah juga kurang memperhatikan atau meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi karena tidak ada campur tangan pemerintah pusat sebagai alat kontrol. Implikasinya, walaupun rasio kemandirian tinggi, tapi pemerataan pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat, begitu juga dengan perbaikan kesejahteraan sehingga tidak terdapat pertumbuhan

ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menurun. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kemampuan daerah yang belum sampai pada tahap mandiri secara keuangan untuk melaksanakan pembangunan dengan kemampuannya sendiri sehingga masih bergantung pada pemerintah pusat (Putra & Hidayat, 2016).

Berdasarkan Tabel 1, terdapat perbedaan yang sangat signifikan rasio kemandirian 12 kabupaten/ kota di Provinsi Riau sehingga pemerataan pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada kesenjangan pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten/ kota, khususnya di Provinsi Riau. Selain itu, berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah di Provinsi Riau masih sangat rendah dan masih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Tirtosuharto, 2010) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang kuat karena meningkatnya kesenjangan antar daerah terutama di tingkat kapasitas pembangunan dan sumber daya. (Puspaningsih & Aryani, 2016) juga menyatakan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tinggi rendahnya tingkat pembangunan daerah.

Di Provinsi Riau, masyarakat kurang merasakan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana publik dan ini merupakan salah satu indikasi kurangnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. (Putra & Hidayat, 2016) menyatakan bahwa peningkatan PAD tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan karena pendapatan tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya. Berdasarkan Tabel 1, rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau berada pada kategori "Kurang". Artinya, pemerintah daerah di Provinsi Riau masih sangat bergantung pada pendanaan pusat. Selain itu, rasio kemandirian yang rendah tersebut juga menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Ketika suatu daerah mampu mendanai kegiatan pemerintah daerah sendiri tanpa ketergantungan dari pemerintah pusat, maka seharusnya pemerintah daerah tersebut dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di daerah tersebut. Rasio kemandirian keuangan daerah yang tinggi menggambarkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang dibuktikan dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang tinggi pula. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka pembayaran PAD tersebut, seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat, aturan pajak yang bersifat memaksa dan sanksi hukum yang diberlakukan jika tidak taat pajak, dan berbagai faktor lainnya.

### **Pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur dengan Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau**

Berdasarkan hasil analisis data pada koefisien jalur model pertama tersebut diperoleh nilai signifikansi 0,296 lebih besar dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 tidak terdukung.

Berdasarkan persamaan regresi, terlihat nilai koefisien beta sebesar 0,014 yang berarti, rasio efektivitas memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perekonomian daerah akan meningkat jika terjadi peningkatan pada rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah yang tinggi menunjukkan realisasi PAD yang tinggi sehingga diharapkan akan mendorong kegiatan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun, realisasi PAD yang tinggi tidak selalu diikuti dengan kegiatan pembangunan

yang tinggi pula, sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas pemerintah daerah/ kabupaten/ kota di Provinsi Riau adalah 110% yang tergolong pada kategori sangat efektif. Rasio efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengukur realisasi penerimaan daerah dibandingkan dengan target penerimaan tersebut. (Halim, 2012) menyatakan bahwasuatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan atau peningkatan pembangunan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur dengan Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau**

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 12 tersebut diperoleh nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan H3 terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2015) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data pada Tabel 5, rasio efisiensi keuangan daerah adalah lebih besar dari 100% dan nilai tersebut berada pada kategori tidak efisien. Angka tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih belum optimal dalam mengelola penerimaan daerah dan mengontrol pengeluaran pemerintah daerah.

Selain itu, angka koefisien beta pada Tabel 12 menunjukkan nilai sebesar -0,077 yang berarti bahwa ketika rasio efisiensi keuangan daerah meningkat nilainya, maka akan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pada rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah meningkat dengan angka yang lebih besar dibanding penerimaan daerah. Ketika pemerintah daerah tidak efisien dalam mengelola keuangan daerah, maka penerimaan daerah tidak dapat dioptimalkan bahkan tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Implikasinya, kegiatan pembangunan daerah terbengkalai bahkan tidak terlaksana dengan baik. Untuk meningkatkan efisiensi keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus meningkatkan penerimaan daerah, terutama yang berasal dari PAD. Cara ini secara tidak langsung akan meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah/ kota di Provinsi Riau karena berdasarkan pengamatan selama 5 tahun, rasio kemandirian daerah/ kota di Provinsi Riau masih sangat rendah, padahal Riau memiliki banyak potensi daerah.

### **Analisis Pengujian Hipotesis dan Interpretasi Model Kedua**

Interpretasi model regresi kedua untuk melihat pengaruh secara tidak langsung terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dengan ditambahkan variabel intervening yakni Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10**  
**Hasil Analisis Regresi Model Kedua**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.418	3.561		2.083	.042
RKM	.025	.024	.135	1.026	.309

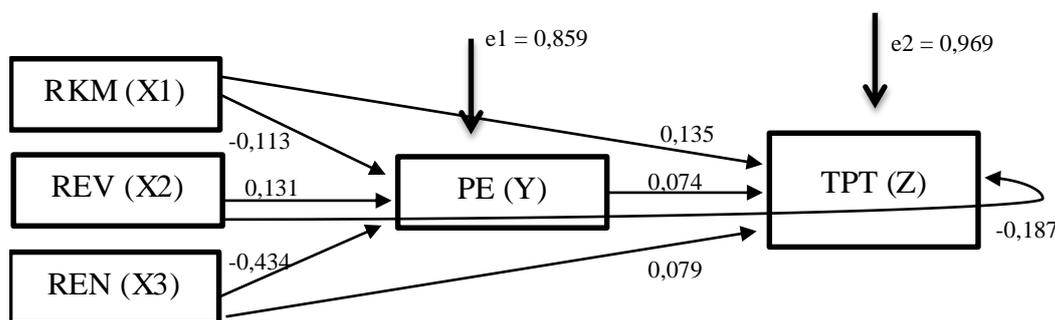
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
REV	-.019	.014	-.187	-1.310	.195
REN	.013	.025	.079	.505	.616
PE	.068	.140	.074	.483	.631

a. Dependent Variable: TPT

Sumber: Data Olahan SPSS,2017

Sama halnya dengan pengujian sebelumnya, hasil uji t statistik apabila lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari t hitung tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya (Hipotesis diterima), begitu juga sebaliknya. Untuk diagram jalur model struktur kedua dari analisis path dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:

**Gambar 5**  
**Diagram Jalur Struktur Kedua**



Berdasarkan Tabel 10 dan Gambar 5 diperoleh interpretasi model regresi kedua sebagai berikut:

**Pengaruh langsung Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau**

Tabel 11 berikut merupakan hasil uji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan daerah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau.

**Tabel 11**  
**Anova Model Kedua**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31,602	4	7,900	,900	,471 <sup>a</sup>
	Residual	483,061	55	8,783		
	Total	514,663	59			

a. Predictors: (Constant), PE, RKM, REV, REN

b. Dependent Variable: TPT

Sumber : Data Olahan SPSS,2017

Berdasarkan output yang terlihat pada tabel koefisien regresi model kedua (Tabel 11), dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari keempat variabel yaitu sebesar 0,471 yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan daerah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa H4 yang diajukan dalam penelitian ini tidak terdukung.

#### **Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau**

Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 5 diketahui pengaruh langsung yang diberikan variabel rasio kemandirian (X1) terhadap tingkat pengangguran (Z) adalah 0,135, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel tersebut melalui pertumbuhan ekonomi (Y) terhadap tingkat pengangguran (Z) adalah sebesar 0,0084 yang merupakan hasil perkalian dari nilai beta variabel X1 terhadap variabel Y dengan nilai beta Y terhadap Z ( $-0,113 \times 0,074 = -0,0084$ ). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan  $0,135 > -0,0084$  yang artinya pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel rasio kemandirian melalui pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau. Maka dengan ini disimpulkan H5 tidak terdukung.

Rasio Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah tersebut untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Rasio kemandirian yang tinggi tidak selalu menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula karena PAD sebagian besar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sifat dari pungutan tersebut adalah wajib. Ketika rasio kemandirian tinggi, tidak selalu diikuti dengan perbaikan kesejahteraan atau perbaikan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran dapat berkurang jika tersedia banyak lapangan pekerjaan untuk pencari kerja dan kompetensi atau keahlian yang dipersyaratkan pemberi kerja dimiliki oleh pencari kerja.

#### **Pengaruh Rasio Efektivitas secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau**

Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 5 diketahui pengaruh langsung yang diberikan variabel rasio efektivitas (X2) terhadap tingkat pengangguran (Z) adalah -0,187, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel tersebut melalui pertumbuhan ekonomi (Y) terhadap tingkat pengangguran (Z) adalah sebesar 0,0097 yang merupakan hasil perkalian dari nilai beta variabel X1 terhadap variabel Y dengan nilai beta Y terhadap Z ( $0,131 \times 0,074 = 0,0097$ ). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan  $-0,187 < 0,0097$  yang artinya pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel rasio efektivitas melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau. Maka dengan ini disimpulkan H6 terdukung.

Rasio efektivitas yang tinggi menggambarkan realisasi penerimaan daerah yang lebih tinggi dibandingkan target penerimaan daerah. Tingginya rasio efektivitas yang diikuti dengan penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang tinggi pula, akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan secara merata akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak sehingga kegiatan tersebut

mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hal tersebut akan dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut.

**Pengaruh Rasio Efisiensi secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau**

Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 5 diketahui pengaruh langsung yang diberikan variabel rasio efisiensi (X3) terhadap tingkat pengangguran (Z) adalah 0,079, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel tersebut melalui pertumbuhan ekonomi (Y) terhadap tingkat pengangguran (Z) adalah sebesar -0,032 yang merupakan hasil perkalian dari nilai beta variabel X1 terhadap variabel Y dengan nilai beta Y terhadap Z ( $-0,434 \times 0,074 = -0,032$ ). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan  $0,079 > -0,032$  yang artinya pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel rasio efisiensi melalui pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau. Maka dengan ini disimpulkan H7 tidak terdukung.

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah. Rasio efisiensi yang rendah menggambarkan bahwa pemerintah daerah tersebut efisien dalam mengelola keuangan daerah. Artinya, pengeluaran daerah tersebut dapat dikontrol sehingga mampu dipertahankan di bawah angka realisasi penerimaan daerah. Pengeluaran daerah tersebut dapat berupa belanja daerah. Ketika pengeluaran daerah rendah, maka sisa penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, ketika rasio efisiensi tinggi, maka pemerintah daerah tersebut tidak efisien dalam mengelola keuangan daerah. Implikasinya, belanja daerah tidak akan terkontrol, sehingga tidak dapat dialokasikan untuk membiayai pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. Dengan demikian, maka tingkat pengangguran tidak akan dapat dikurangi.

**Analisis Goodness-of-Fit (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Pengujian *Goodness of-Fit* (koefisien determinasi) bertujuan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran dapat dijelaskan oleh variabel independen kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Uji ini juga dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi melalui pengukuran seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Berikut hasil dari uji *Goodness-of-Fit* (adjusted R<sup>2</sup>) pada Tabel 12.

**Tabel 12**  
**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Regresi Model Pertama**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>						
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted Square</b>	<b>R</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>	<b>Durbin-Watson</b>
1	.512 <sup>a</sup>	.262	.223	2.81901	1.241	

a. Predictors: (Constant), REN, RKM, REV

b. Dependent Variable: PE

Sumber: Data Olahan SPSS,2017

Dari hasil uji analisis regresi model pertama dengan menggunakan SPSS versi 22 seperti yang tercantum pada Tabel 12, dapat dilihat besarnya nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,262. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel-variabel kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan yang mencakup rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas terhadap variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 26,2% sementara sisanya sebesar 73,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

Untuk koefisien determinasi regresi model kedua yaitu untuk melihat kontribusi variabel-variabel kinerja keuangan daerah yang diteliti dengan adanya penambahan variabel intervening yakni pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran dapat dilihat pada Tabel 13.

**Tabel 13**  
**Koefisien Determinasi (*R<sup>2</sup>*) Regresi Model Kedua**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>						
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted Square</b>	<b>R</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>	<b>Durbin-Watson</b>
1	.248 <sup>a</sup>	.061	-.007		2.96360	1.173

a. Predictors: (Constant), PE, RKM, REV, REN

b. Dependent Variable: TPT

Sumber: Data Olahan SPSS,2017

Besarnya nilai *R<sup>2</sup>* adalah 0,061, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel-variabel kinerja keuangan daerah terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,1% sementara sisanya merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara langsung, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sedangkan untuk rasio efisiensi, terdapat pengaruh yang signifikan antar rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.
2. Secara langsung, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau.
3. Secara tidak langsung, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau melalui variabel pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sedangkan untuk rasio efektivitas, terdapat pengaruh yang signifikan antar rasio efektivitas terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas keluasaan ilmu yang sudah diberikan kepada umatnya, dan tidak lupa pula terimakasih Penulis ucapkan kepada rekan-rekan dosen maupun instansi-instansi terkait data yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil, sehingga penelitian ini terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Dan seterusnya kepada Politeknik Caltex Riau atas pendanaan penelitian yang telah diberikan untuk mendukung aktivitas dan produktifitas tri dharma perguruan tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ani, N. L. N. P., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3), 481–497. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8341>
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE).
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*, 6(1 Juli 2015), 1–18.
- BAPPENAS. (2015). Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Riau 2015 (pp. 1–36). Retrieved from [http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/AnalisisProvinsiRiau2015\\_ok.pdf](http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/AnalisisProvinsiRiau2015_ok.pdf)
- BPS. (2015). Keadaan Ketenagakerjaan Riau (pp. 1–6).
- BPS. (2016). PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU. In B. P. Riau (Ed.), *Berita Resmi Statistik* (Berita Res, pp. 1–8).
- Florida, A. (2006). *Pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Empa). Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2013). Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Keban, Y. K. (2008). Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah.
- Puspaningsih, D. P. D., & Aryani, N. K. L. (2016). Kinerja Keuangan Daerah sebagai Pemoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (3).
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3 (4), 243–256.
- Siregar. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi. *KURS*, 1 (1).
- Sunyoto, D. (2010). *Uji khi kuadrat Regresi dan Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tirtosuharto, D. (2010). The Impact of Fiscal Desentralization and State Allocative Efficiency On Regional Growth in Indonesia. *Journal of International Commerce , Economics, and Policy*, 1 (2), 287–307.